

WARISAN BUDAYA, PARIWISATA DAN PEMBANGUNAN DI MUARAJAMBI, SUMATRA

Devi Roza K. Kausar
Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila

Abstract

This paper is part of a preliminary study on the potentials and problems in the development of heritage tourism as a rural and regional development strategy in Muarajambi. It aims to present the various dynamics in the relationship between tourism, cultural heritage, and development through Muarajambi's case. This study uses qualitative data obtained through field observations, interviews, secondary data collection and literature studies. It concludes that the development of certain economic sectors within the heritage area causes disruption to heritage conservation and limits heritage tourism development. The study suggests that the area must be declared as heritage conservation area through appropriate legal framework and that clear coordination mechanism between central and local governments that aim toward conserving heritage for communities' welfare should be realized.

Keywords: *cultural heritage, tourism, development*

PENDAHULUAN

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) pada tahun 2005 mencatat bahwa kunjungan ke obyek wisata warisan budaya dan sejarah telah menjadi salah satu kegiatan wisata yang tercepat pertumbuhannya (Timothy dan Nyaupane, 2009). Dua jenis kegiatan wisata yang erat hubungannya dengan warisan budaya dan peninggalan sejarah adalah *cultural tourism* (wisata budaya) dan *heritage tourism* (wisata ke situs-situs warisan atau pusaka). Poria et al. (2006) mendefinisikan *heritage tourism* sebagai setiap kunjungan ke situs warisan budaya, alam maupun peninggalan sejarah, terlepas dari motivasi dan persepsi pengunjung pada atribut situs tersebut. Pengertian *heritage tourism* dan *cultural tourism* terkadang tumpang tindih dan penggunaan kedua istilah tersebut sering dipertukarkan karena keduanya saling berkaitan erat. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara *heritage tourism* dan *cultural*

tourism. Wisata budaya dapat didefinisikan sebagai wisata minat khusus yang menekankan pada pencarian dan partisipasi dalam pengalaman budaya yang baru dan mendalam baik dari aspek estetika, intelektual, emosional dan psikologis (Stebbins, 1996). Dengan demikian menurut Stebbins (ibid), *cultural tourism* dapat mencakup kunjungan ke museum, galeri, festival, pertunjukan seni, dan situs bersejarah, termasuk situs warisan budaya. *Heritage tourism* lebih menekankan pada "tempat" atau menyiratkan bahwa kegiatan wisata harus dilakukan pada situs warisan tertentu (*in situ*), sedangkan wisata budaya tidak menekankan pada aspek "tempat" karena pada kegiatan wisata budaya, aktivitas mengamati dan mempelajari suatu budaya dapat dilakukan secara *ex situ* atau di luar tempat asalnya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konsep *heritage* yang terwujud dalam sebuah kompleks permandian peninggalan abad ke-7 sampai ke-14

di Kabupaten Muarajambi, Provinsi Jambi. Menurut asal katanya, *heritage* berarti sesuatu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. *Heritage* menurut Ashworth (2006) adalah sesuatu yang terpilih untuk dilestarikan. Di dalamnya terkandung interpretasi dari sejarah masa lalu yang hadir melalui monumen dan artefak, dikombinasikan dengan memori kolektif individu maupun kelompok untuk merespon kebutuhan masa kini yang meliputi penguatan identitas, kebanggaan, serta kebutuhan akan sebuah sumber daya yang dapat dimanfaatkan, misalnya untuk pariwisata (Ashworth dan Tunbridge, 1999).

Kompleks Percandian Muarajambi pernah menjadi pusat ibadah dan pendidikan agama Buddha di masa Kerajaan Melayu Kuno Sriwijaya pada abad ke-7 sampai abad ke-14 (Munoz, 2006; Utomo, 2012). Kompleks ini mencakup kawasan seluas 2.602 hektar yang posisinya terbentang sepanjang 7,5 kilometer di tepi Sungai Batanghari. Setidaknya ada 82 reruntuhan bangunan kuno atau candi yang terbuat dari konstruksi batu bata, namun baru tujuh candi yang telah dipugar. Sejak Oktober 2009, Candi Muarajambi telah didaftarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia masuk ke daftar tentatif (*tentative lists*) untuk dipertimbangkan sebagai situs Warisan Dunia. Daftar tentatif Warisan Dunia adalah daftar situs yang dipertimbangkan oleh negara-negara pengusul untuk dinominasikan menjadi situs Warisan Dunia. Penunjukan sebagai situs Warisan Dunia, menurut Drost (1996) dan Li et al. (2008) dapat meningkatkan visibilitas internasional dari suatu situs dan akan mendorong kunjungan wisata karena adanya berbagai kegiatan promosi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku industri pariwisata maupun UNESCO dan Komite Warisan Dunia.

Meskipun demikian, walaupun telah masuk ke dalam daftar tentatif Warisan Dunia, terdapat beberapa masalah yang masih menjadi ganjalan

jika kompleks percandian ini akan dinominasikan sebagai situs Warisan Dunia dan apabila *heritage tourism* akan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini keutuhan dan pelestarian kawasan Candi Muarajambi sebagai kawasan arkeologi terancam oleh keberadaan *stockpile* (penimbunan) batubara, perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit (BBC Indonesia edisi 16 Februari 2012; Fahmy, 2012; Sirait, 2012). Pembangunan berbagai industri di zona inti kawasan percandian Muarajambi ini disinyalir seiring dengan percepatan pembangunan setelah diberlakukannya UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 di mana pemerintah daerah, dalam sistem desentralisasi, mempunyai hak untuk memberikan ijin investasi.

Makalah ini merupakan bagian dari sebuah penelitian awal mengenai potensi dan permasalahan dalam pengembangan *heritage tourism* sebagai salah satu strategi pembangunan daerah dan wilayah pedesaan di Muarajambi. Engelhardt (2005) dan Matsuura (2008) mengatakan bahwa paradigma pengelolaan *heritage* harus berkembang menjadi bukan semata untuk pelestarian tetapi juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, Millar (1989) mengingatkan bahwa konteks *heritage tourism* sangat berbeda dengan pariwisata pada umumnya, karena menggunakan sumber daya yang tak tergantikan sehingga pelestarian adalah komponen penting dari *heritage tourism*. Oleh karena itu dalam pemanfaatan warisan budaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sering terjadi berbagai dinamika antara pelestarian warisan budaya, pariwisata, dan pembangunan atau kemajuan-kemajuan yang terjadi di lingkungan warisan budaya, baik yang disebabkan oleh pariwisata maupun oleh kegiatan pembangunan lainnya. Atas dasar hal tersebut, makalah ini bertujuan untuk menyajikan berbagai dinamika

dalam hubungan antara pariwisata, warisan budaya, dan pembangunan melalui studi kasus Muarajambi. Di satu sisi, pengembangan *heritage tourism* amat dipengaruhi oleh pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur yang memungkinkan akses yang lebih baik menuju ke lokasi. Di lain pihak, aktivitas pembangunan yang terjadi di sekitar situs warisan budaya, yang tak jarang merupakan akibat dari pembangunan infrastruktur, sangat berpengaruh terhadap kelestarian situs. Selain membahas berbagai dinamika tersebut, makalah ini juga berusaha mengidentifikasi potensi pengembangan *heritage tourism* dari perspektif modal budaya (*cultural capital*) dan modal sosial (*social capital*) serta mengidentifikasi masalah-masalah yang masih harus diselesaikan agar pembangunan *heritage tourism* di Muarajambi membawa manfaat bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan pengumpulan data sekunder maupun literatur pendukung. Wawancara di Muarajambi dilakukan terhadap tokoh pemuda yang menginisiasi program pendidikan *heritage* bagi anak-anak sekolah di sekitar candi dan juga berperan mengembangkan pariwisata yang masih berada pada tahap awal. Selain itu, penulis juga mewawancarai pejabat dari Kantor Pelestarian Warisan Budaya Jambi (BPCB) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Di Jakarta, wawancara dilakukan terhadap perwakilan dari Perhimpunan Pelestarian Muarajambi (PPMJ), *Cultural Programme Specialist* Kantor UNESCO Jakarta dan pejabat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, seorang ahli arkeologi juga diwawancarai sebagai informan ahli untuk penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini dibagi menjadi tiga sub bagian. Sub bagian pertama adalah uraian mengenai sejarah Muarajambi dan situasi kawasan tersebut saat ini. Sub bagian kedua mencoba mengidentifikasi potensi pengembangan *heritage tourism* di Muarajambi dan masalah-masalah yang masih perlu diatasi dalam pengembangan tersebut. Kemudian sub bagian ketiga membahas mengenai dinamika dalam hubungan antara warisan budaya, pariwisata, dan pembangunan di Muarajambi.

Kompleks Percandian Muarajambi: Sejarah dan Situasinya Kini

Menurut sejarah, Jambi termasuk dalam wilayah Kerajaan Sriwijaya yang pada masa kejayaannya terlibat aktif dalam perdagangan sepanjang Selat Malaka dan sekitarnya. Ketika Kerajaan Sriwijaya memerintah wilayah sekitarnya Abad ke-7 sampai ke-14 Masehi, pusat kekuasaan sempat berpindah ke beberapa lokasi yang berbeda, tergantung pada perkembangan politik regional saat itu. Pusat kekuasaan misalnya pernah pindah dari Palembang ke Jambi (Munoz, 2006; Utomo, 2012). Perpindahan ke Jambi menurut sebagian ahli disebabkan oleh serangan para perompak dari daerah Chola (India Selatan) pada tahun 1025 yang menghancurkan sebagian besar Palembang (Munoz, 2006).

Sejarah juga mencatat bahwa Candi Muarajambi dulunya adalah sebuah pusat pendidikan (universitas) agama Budha tertua dan terbesar di Asia Tenggara yang memegang peran penting selama kurang lebih tujuh abad (Sirait, 2012). Muarajambi adalah tempat di mana bukan hanya agama yang dipelajari, tetapi juga ilmu kedokteran, logika, filsafat dan arsitektur. Universitas kuno ini memiliki hubungan yang erat dengan Universitas Nalanda di India yang juga berfungsi sebagai pusat

pendidikan agama Budha yang terkemuka (Sudhamek, 2010; Wahid, 2011). Munoz (2006) menjelaskan bahwa hampir semua biksu Cina yang bepergian melalui laut antara Cina dan India berhenti di wilayah Sriwijaya untuk belajar di berbagai biara-biara. Para biksu belajar bahasa Sansekerta dan mempersiapkan diri untuk kelanjutan perjalanan mereka ke Nalanda. Selain itu, I- Tsing, seorang pendeta Budha dari Cina yang meninggalkan catatan tertulis dari 25 tahun perjalanannya di Asia juga menggambarkan kebesaran sebuah pusat pembelajaran di Pulau Sumatra (Sudhamek, 2010).



Gambar 1. Candi Tinggi, salah satu candi di Kompleks Percandian Muarajambi
Sumber: koleksi pribadi

Kebesaran sejarah Candi Muarajambi membuatnya didaftarkan ke dalam daftar sementara (*tentative lists*) untuk dipertimbangkan menjadi Situs Warisan Dunia oleh pemerintah Indonesia. Candi Muarajambi dianggap memenuhi kriteria kedua, tiga, dan empat dari sepuluh kriteria Warisan Dunia yang disebut sebagai *outstanding universal value* atau OUV (UNESCO, 2009). Kriteria kedua berbunyi sebagai berikut *“To exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, town-planning or landscape design”* yang berarti bahwa situs Muarajambi merupakan hasil dari pertukaran dan interaksi

nilai-nilai, yang terjadi pada kurun waktu tertentu dan terwujud dalam teknologi arsitektur, seni, perencanaan kota dan lansekap yang ada di dalamnya. Sedangkan kriteria ketiga adalah *“To be a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared”* yang mempunyai makna bahwa situs Muarajambi adalah sebuah wujud dari tradisi maupun peradaban yang masih ada maupun telah hilang. Kriteria yang terakhir yaitu kriteria keempat, sebagai berikut: *“Be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates significant stages in traditional human settlement, land use, or water management that represents cultural values or the interaction of a culture (or cultures), or the interaction of humans with nature, especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change”*. Maksud dari kriteria keempat adalah bahwa situs Muarajambi merupakan contoh dari bangunan atau arsitektur atau teknologi atau lansekap yang menggambarkan suatu tahap di mana terjadi interaksi antara manusia dengan alam dan interaksi antarbudaya. Indonesia saat ini memiliki 26 situs pada daftar sementara tersebut. Setiap negara yang meratifikasi Konvensi Warisan Dunia dapat mengusulkan situs yang akan dimasukkan ke daftar sementara melalui proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan di negaranya.

Ironisnya, kawasan percandian ini juga merupakan tempat beroperasinya berbagai industri berat. Sejak 1980-an, sejumlah perusahaan kayu telah aktif di kawasan ini. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, terdapat juga beberapa perusahaan yang bergerak di bidang penimbunan batubara (sebelum diangkut melalui Sungai Batanghari) dan pabrik pemrosesan kelapa sawit (Sirait, 2012). Debu dari timbunan

batubara dapat merusak candi kuno yang ada disekitarnya, sedangkan pembangunan bangunan pabrik dalam kawasan arkeologi seharusnya dihindari karena terdapat kemungkinan bahwa masih banyak sisa-sisa peradaban masa lalu yang belum tergali.

Namun demikian, industri batubara dan kelapa sawit merupakan kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Muarajambi. Sektor pertambangan dan penggalian menghasilkan PDB 218.669 juta rupiah pada tahun 2009 atau 19,5 % dari PDRB tahun tersebut (BPS Jambi, 2012). Sedangkan sektor pertanian, yang meliputi perkebunan kelapa sawit, memberikan kontribusi PDB sebesar 384.007 juta rupiah pada tahun 2009 atau sekitar 34% dari total PDRB.

Indonesia memang merupakan salah satu produsen terbesar dunia untuk batu bara maupun kelapa sawit. Produksi batubara Indonesia berada di peringkat kelima di dunia, setelah Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, India, dan Australia, dengan produksi yang mencapai 376 juta ton pada tahun 2011 (Budiarto, 2012). Di lain pihak, Indonesia merupakan produsen terbesar kelapa sawit di dunia dengan produksi minyak sawit Indonesia mencapai 19.844.901 ton pada tahun 2010 yang membuatnya menjadi produsen nomor satu di dunia (Hapsari, 2011). Indonesia telah menjadi tujuan utama investasi asing langsung di sektor perkebunan kelapa sawit dan peluang tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh kebanyakan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Muarajambi.

Belum ditetapkannya kompleks percandian Muarajambi menjadi kawasan cagar budaya menyebabkan pemerintah kabupaten dapat memberikan ijin usaha kepada perusahaan batu bara dan kelapa sawit sehingga kedua industri tersebut sebenarnya beroperasi tanpa

melanggar hukum. Menanggapi hal itu, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Muarajambi telah melobi pemerintah daerah setempat sejak tahun 2007. Namun, situasi belum berubah sampai saat ini karena belum ada kerangka hukum yang dapat mengawal pelestarian Candi Muarajambi.

Rizzo dan Mignosa (2006) menekankan bahwa *heritage* adalah luaran dari proses regulasi. Pada tataran global, Konvensi Warisan Dunia adalah “*soft law*” atau instrumen-instrumen tertulis namun tidak mengikat yang berfungsi sebagai payung untuk mengidentifikasi, melindungi, dan melestarikan warisan alam dan budaya. Sedangkan, pada tataran nasional dan lokal, hukum dan peraturan adalah instrumen yang berperan penting dalam pencapaian tujuan Konvensi Warisan Dunia tersebut. Oleh karena itu, Rizzo dan Mignosa (2006) menggarisbawahi pentingnya mengevaluasi perundangan dan peraturan apa yang mempengaruhi sebuah situs warisan atau kawasan lindung. Pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sebetulnya diuraikan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati atau Walikota, harus memulai proses awal pencaanangan situs warisan budaya atau alam dengan lebih dulu mendeklarasikan suatu kawasan warisan budaya atau alam di tingkat lokal sesuai dengan rekomendasi dari para ahli. Dengan demikian penetapan Candi Muarajambi sebagai cagar budaya sesungguhnya berpulang kepada “*political will*” pemerintah daerah untuk lebih dulu memulai proses tersebut. Tirtosudarmo (2013) mengatakan bahwa kondisi mengkhawatirkan di beberapa situs warisan budaya Indonesia, seperti Candi Muarajambi dan situs Trowulan di Mojokerto adalah akibat kurangnya perhatian dan komitmen pemerintah dalam kebijakannya mengenai pelestarian warisan budaya.

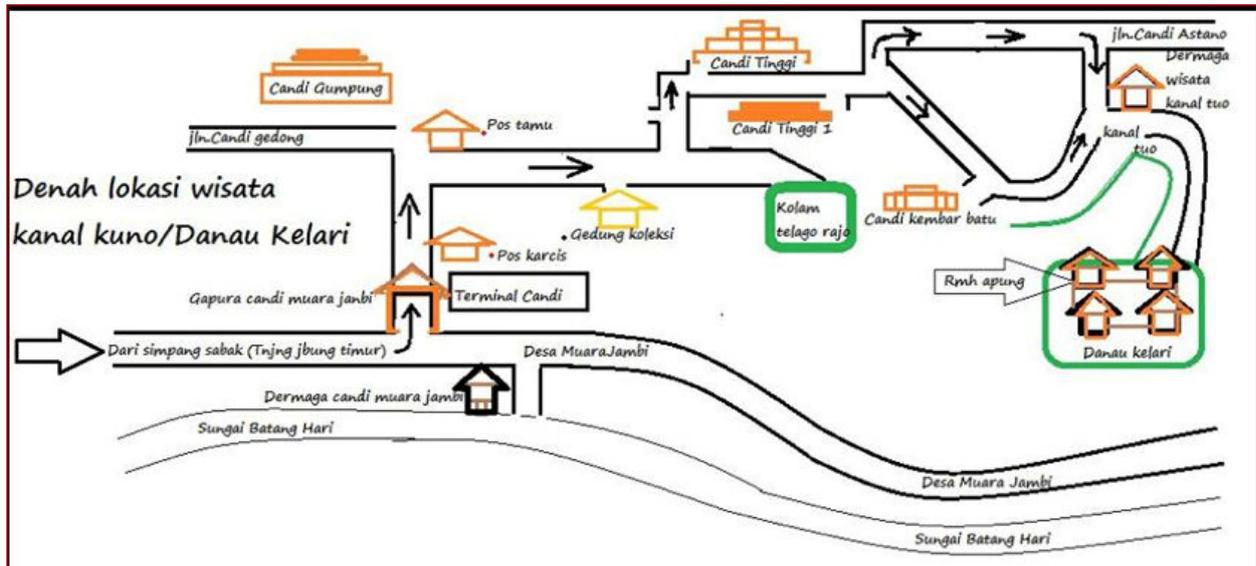
Pengembangan Heritage Tourism di Muarajambi: Potensi dan Permasalahan

Pada bulan September 2011, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan kompleks percandian Muarajambi sebagai kawasan sejarah terpadu. Pengembangan menjadi sebuah kawasan sejarah terpadu tentunya membutuhkan berbagai strategi yang jitu agar dapat terealisasi dan agar aktivitas *heritage tourism* yang dikembangkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa paragraf selanjutnya dari sub bagian ini akan membahas potensi yang telah dimiliki untuk upaya pengembangan *heritage tourism* di Muarajambi.

Sesuai dengan konsep *heritage tourism* yang menekankan bahwa aktivitas wisata dilakukan secara “in situ” atau pada situs warisan, *cultural capital* (modal budaya) berupa fisik bangunan maupun kondisi kawasan menjadi hal pokok yang harus diperhatikan. *Cultural capital* atau aset budaya menurut Throsby (2003) adalah aset budaya yang ketika dikombinasikan dengan input lainnya, berkontribusi terhadap produksi benda budaya lainnya. Dengan kata lain, aset budaya seperti Candi Muarajambi, Candi Borobudur, dan warisan budaya lainnya ketika dikombinasikan dengan keterampilan, pengetahuan, dan modal finansial, menginspirasi produksi benda maupun jasa lain. Dalam konteks Muarajambi, aset budaya untuk pengembangan *heritage tourism* adalah fisik bangunan candi yang sudah dipugar maupun sisa candi yang belum dipugar (disebut menapo); kawasan percandian itu sendiri yang di dalamnya terdapat kanal-kanal kuno yang menghubungkan satu area dengan area lainnya; desa-desa Melayu yang ada di dalam kawasan percandian; adat istiadat setempat; dan seni budaya masyarakat.

Disamping itu, sejarah kawasan serta interpretasi dari adat istiadat maupun seni budaya masyarakat juga merupakan aset budaya yang sifatnya *intangible* atau tak benda.

Idealnya pemanfaatan berbagai aset budaya ini dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat menghasilkan produk pariwisata yang menarik dan tidak hanya terfokus kepada fisik bangunan candi. Produk pariwisata berupa *tour* kawasan misalnya dapat mencakup juga kunjungan ke desa-desa setempat di mana wisatawan dapat berinteraksi dengan masyarakat lokal, jelajah sungai dan kanal (yang saat ini sudah mulai dilakukan), dan pertunjukan seni budaya. Saat ini, beberapa *tour operator* telah mengembangkan wisata ziarah ke kawasan candi yang menargetkan wisatawan dari Cina, khususnya Tibet. Beberapa grup pendeta Budha dari Tibet juga telah datang ke Muarajambi untuk melakukan ziarah ke candi. Wisatawan asing yang melakukan wisata ziarah ini selain mengunjungi candi juga mengikuti kegiatan lainnya seperti menelusuri Sungai Batanghari bahkan kanal-kanal yang ada di kawasan, mengunjungi desa-desa dan menikmati kuliner lokal. Kegiatan menelusuri kanal, yang merupakan kanal-kanal kuno yang dibangun dan digunakan pada abad 7 sampai abad 14 ini, biasanya berakhir dengan mengunjungi rumah-rumah apung di Danau Kelari yang masih berada di dalam kawasan percandian. Rumah-rumah tersebut yang dibuat dengan konsep panggung dan berada di atas Danau Kelari menjadi tempat untuk menikmati kuliner khas Jambi (lihat Gambar 2 untuk salah satu contoh rute *tour*). Pembangunan rumah apung merupakan inisiatif dari tokoh-tokoh pemuda dan penggiat pariwisata setempat dengan bantuan dana CSR (*corporate social responsibility*) dari sebuah bank swasta.



Gambar 2. Rute Wisata Kanal Kuno
Sumber: SGP Tours

Perkembangan yang menggembirakan pada aspek pemasaran kawasan sebagai atraksi pariwisata harus didukung oleh fasilitas umum yang memadai. Saat ini, fasilitas pendukung pariwisata masih sangat minim di dalam kawasan candi. Kehadiran usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata masih terbatas pada usaha makan dan minum yang sederhana. Fasilitas kegiatan wisata budaya pun belum dilakukan bersama-sama dengan promosi kerajinan lokal Jambi secara optimal.

Selain modal budaya yang telah dibahas di atas, tulisan ini juga ingin membahas mengenai modal sosial sebagai bagian dari faktor pendukung potensi yang telah ada. Modal sosial atau *social capital* menurut Putnam (1995) adalah aspek-aspek dari suatu organisasi sosial yang mencakup jaringan, norma, dan kepercayaan, yang memfasilitasi timbulnya koordinasi dan kerjasama untuk perolehan manfaat bersama. Beberapa bentuk kerjasama yang sudah berjalan antar anggota masyarakat dan dengan pengelola kawasan merupakan indikasi adanya modal sosial pada pengembangan pariwisata berbasis *heritage* di kawasan Muarajambi.

Salah satu contoh bentuk kerjasama adalah penyediaan sepeda sewa untuk pengunjung oleh masyarakat yang dipicu oleh adanya jalur bersepeda yang dibangun oleh BPCB. Disamping itu, terdapat beberapa organisasi yang diinisiasi oleh kalangan pemuda yang kegiatannya dapat menjadi cikal bakal pariwisata berbasis masyarakat di Muarajambi. Pariwisata berbasis masyarakat menurut Ashely pada Beeton (2006) adalah kegiatan pariwisata di mana masyarakat lokal berperan sebagai pelaku aktif, antara lain sebagai pengelola area, pengusaha, pegawai, pengambil keputusan dan juga sebagai pelestari kawasan. Menurut Beeton (2006), pariwisata berbasis masyarakat bertujuan untuk menciptakan industri pariwisata yang lebih berkelanjutan dan senantiasa memperhatikan masyarakat lokal dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan pariwisata.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemuda lokal adalah pendidikan pengenalan mengenai candi sebagai warisan atau *heritage* berupa aktivitas mingguan yang diikuti oleh siswa-siswi sekolah setempat. Organisasi penyelenggara, disebut Saramuja (Sekolah Alam Raya Muarajambi), termotivasi

oleh kenyataan bahwa banyak generasi muda, khususnya siswa sekolah yang tidak memahami sejarah dan peran penting yang pernah diemban oleh Muarajambi dalam perkembangan peradaban dunia. Kegiatan pengenalan *heritage* yang dilakukan oleh Saramuja meliputi kunjungan ke candi-candi sambil mendengarkan penjelasan pembimbing, menggambar dan melukis candi, pertunjukan musik, dan pembuatan film untuk pendidikan masyarakat.

Dalam perkembangannya, Saramuja dan organisasi pemuda lainnya yang masing-masing mempunyai fokus tertentu, misalnya pengembangan kerajinan dan pelatihan pemandu wisata, melebur menjadi Yayasan Padmasana yang ditetapkan oleh Akte Notaris. Keterlibatan para penggiat pariwisata atau pengusaha dalam aktivitas pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh para pemuda tersebut kemudian menambah nilai bagi pariwisata di Muarajambi. Pasar wisatawan asing, terutama wisatawan Cina bahkan pendeta Budha dari Tibet, mulai terbuka (seperti telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya mengenai modal budaya). Kreativitas para pemuda juga tampak dalam penyelenggaraan beberapa event seperti “Festival Kanal Kuno” pada tahun 2012 dan “Pentas Seni dan Budaya Situs Percandian Muarajambi – Road to World Heritage Site”, yang baru saja dilaksanakan pada bulan Agustus 2013.

Namun demikian, selain beberapa perkembangan yang dibahas di atas, terdapat beberapa permasalahan dalam pengembangan pariwisata di Muarajambi seperti telah disinggung secara sekilas pada bagian-bagian sebelumnya dari tulisan ini. Masalah paling utama adalah ketidakpastian status kawasan yang belum ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya sehingga kerangka hukum untuk pelestarian kawasan ini belum memadai. Dalam hal ini tampak bahwa pemerintah pusat dan pemerintah

daerah belum memiliki persepsi yang sama tentang pentingnya Muarajambi dalam konteks sejarah dan budaya. Pemerintah pusat yang merupakan pihak yang meratifikasi Konvensi Warisan Dunia, mendaftarkan situs ini ke dalam daftar sementara Warisan Dunia, sementara di tingkat lokal, upaya pelestarian situs malah terganggu oleh pembangunan sektor ekonomi lainnya. Kerangka hukum yang tidak memadai, belum adanya komunikasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, dan tidak adanya mekanisme pengambilan keputusan bersama, telah disebutkan pada studi-studi sebelumnya sebagai beberapa masalah yang biasa dihadapi dalam pengelolaan *heritage* di negara berkembang (Nuryanti, 1996; Aas et al., 2005; Kausar, 2011).

Pada era desentralisasi seperti saat ini, masalah-masalah tersebut di atas menjadi semakin mengemuka karena pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan pada masa sebelumnya. Hal ini mempunyai konsekuensi terhadap kebijakan pemerintah daerah yang seringkali memprioritaskan kepentingan ekonomi jangka pendek, misalnya melalui pemberian ijin bagi industri pada kawasan bersejarah dibandingkan kepentingan pelestarian yang dapat berdampak pada kebanggaan nasional namun saat ini masih terbatas manfaat ekonominya. Pada konteks kepariwisataan, pengklasifikasian urusan pariwisata sebagai urusan pilihan dan bukan urusan wajib bagi pemerintah daerah, sebagaimana terkandung pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga dapat berkontribusi terhadap kurangnya wawasan kepariwisataan di kalangan aparat daerah. Hasil wawancara dengan pejabat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi atau bahkan pengelolaan bersama (*collaborative management*) terkait sumber daya alam maupun budaya

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih harus dirumuskan sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Kerangka hukum yang memadai, kerjasama dan mekanisme koordinasi yang tepat antara pemerintah pusat dan daerah tentunya juga dibutuhkan dalam proses pengukuhan kompleks percandian Muarajambi sebagai situs Warisan Dunia. Pedoman Operasional Konvensi Warisan Dunia mensyaratkan setiap situs yang dinominasikan untuk memiliki rencana pengelolaan (*management plan*). *Cultural Programme Specialist* Kantor UNESCO Jakarta bahkan mengatakan bahwa persyaratan rencana pengelolaan tersebut sesungguhnya sudah harus dipenuhi sejak suatu situs masuk ke dalam daftar sementara Warisan Dunia. Namun demikian, situs Muarajambi belum memiliki rencana pengelolaan tersebut. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial dalam penyusunan rencana pengelolaan ini karena pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pemanfaatan Warisan Dunia pasti akan bersinggungan dengan berbagai agenda pembangunan lainnya di tingkat lokal.

Dinamika Hubungan Warisan Budaya, Pariwisata dan Pembangunan di Muarajambi.

Pemerintah Provinsi Jambi mengharapkan Candi Muarajambi untuk memainkan peran penting sebagai sumber daya pembangunan melalui pariwisata. Hal ini terlihat dari promosi candi ini dalam buklet promosi pariwisata bersama dengan atraksi lainnya di Jambi, seperti Candi Muaratakus dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Muarajambi, yang menerima rata-rata 5.000 pengunjung per bulan, telah memiliki sebuah Master Plan dan Desain Rekayasa Terperinci (Detail Engineering Design – DED) sejak tahun 2006 dan 2007. Dokumen-dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman untuk pengembangan daerah Muarajambi. Namun demikian, Master

Plan dan DED tersebut belum direalisasikan sampai saat ini. Dokumen-dokumen tersebut juga mempunyai beberapa kekurangan, misalnya keberadaan beberapa desa yang ada di dalam kompleks percandian tidak tampak dalam DED sehingga menimbulkan pertanyaan dan bahkan isu meresahkan bahwa masyarakat akan dipindahkan jika kawasan ini menjadi kawasan cagar budaya. Realisasi dari Master Plan dan DED tersebut juga belum dapat terlaksana karena masih adanya industri-industri berat yang tidak sejalan dengan pelestarian warisan budaya dan pengembangan *heritage tourism* seperti telah diuraikan sebelumnya.

Isu-isu yang dibahas pada tulisan ini merupakan gambaran dari dinamika hubungan antara warisan budaya, pariwisata dan pembangunan, khususnya di Muarajambi. Secara garis besar pola hubungan antara ketiganya secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Pola hubungan yang pertama adalah ketika pembangunan menjadi penyebab rusak atau bahkan hilangnya situs warisan alam ataupun budaya sehingga tidak ada aktivitas *heritage tourism* yang dapat dikembangkan. Pola hubungan yang kedua adalah ketika pelestarian dan pemanfaatan *heritage* difasilitasi oleh pembangunan infrastruktur dan kelembagaan, namun seiring berjalannya waktu menimbulkan dampak negatif terhadap situs, misalnya karena pengunjung terlalu banyak yang disebabkan karena akses yang mudah menuju situs. Pola hubungan yang ketiga adalah ketika pelestarian hanya untuk pelestarian itu sendiri, tanpa memikirkan manfaat suatu situs untuk pembangunan masyarakat. Pola hubungan yang keempat adalah keselarasan antara pelestarian, pemanfaatan *heritage* untuk pariwisata berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui *heritage tourism*.

Pada konteks Muarajambi, pembangunan infrastruktur telah menjamin konektivitas yang baik antara kompleks percandian dengan Jambi

sebagai ibukota provinsi. Harapan untuk pengembangan *heritage tourism* pun mulai muncul, bahkan sudah mulai dirintis oleh masyarakat. Namun demikian, lokasi yang strategis di tepi Sungai Batanghari serta akses yang baik menjadi ancaman tersendiri karena banyaknya sektor ekonomi lain yang ingin memanfaatkan kawasan tersebut. Sayangnya, tidak semua sektor ekonomi yang dikembangkan sejalan dengan prinsip-prinsip pelestarian kawasan arkeologis.

KESIMPULAN

Tulisan ini menyajikan dinamika pelestarian warisan budaya dan politik pembangunan warisan budaya melalui kasus Muarajambi. Ia merupakan bagian dari sebuah penelitian awal mengenai potensi dan permasalahan dalam pengembangan *heritage tourism* sebagai salah satu strategi pembangunan daerah dan wilayah pedesaan di Muarajambi. Persaingan kepentingan di era desentralisasi adalah salah satu fakta yang dijelaskan pada tulisan ini.

Modal sosial untuk optimalisasi pemanfaatan modal budaya yang berkelanjutan telah tampak di kalangan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam usaha penyewaan sepeda, aktivisme pemuda setempat dalam penyelenggaraan pendidikan *heritage*, dan kerjasama antara masyarakat dan industri dalam pengadaan sarana dan dalam penyelenggaraan tour, merupakan modal dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Tulisan ini juga mencoba mengklasifikasikan pola hubungan antara warisan budaya, pariwisata dan pembangunan menjadi empat pola hubungan. Pola hubungan di Muarajambi saat ini menunjukkan bahwa pembangunan beberapa sektor ekonomi lain pada kawasan atau di sekitar kawasan menjadi penyebab terganggunya aktivitas konservasi dan belum optimalnya pengembangan *heritage tourism*.

Untuk itu kerangka hukum yang menjelaskan kepastian status kawasan dan mekanisme koordinasi yang jelas pemerintah pusat dan daerah perlu didorong realisasinya. Hal ini agar pengembangan *heritage tourism* dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di/atau sekitar kompleks percdanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aas, C., Ladkin, A., dan Fletcher, J. 2005. Stakeholder Collaboration and Heritage Management. *Annals of Tourism Research* 32: 28-48.
- Asworth, G.J. dan Tunbridge, J.E. 1999. Old Cities, New Pasts: Heritage Planning in Selected Cities of Central Europe. *GeoJournal* 49: 105-116.
- Asworth, G.J. 2006. The Commodification of the Past as an Instrument for Local Development: Don't Count on It. dalam McLoughlin, J., Kaminski, J. and Sodagar, B. (editor) *Heritage Impact 2005: Proceedings of the First International Symposium on the Socio-economic Impact of Cultural Heritage*. Budapest: Archaeolingua.
- BBC Indonesia. 2012. *Petisi Penyelamatan Situs Muarajambi* (Save Muarajambi Online Petition). BBC Indonesia 16 Februari 2012 edition. Tersedia online: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/02/120216_savesits_muarajambi.shtml, diakses: 18 February 2013.
- Beeton, S. 2006. *Community Development through Tourism*. Collingwood: Landlinks Press.
- BPS Jambi. 2012. Produk Domestik Regional Bruto.
- Budiarto, I. 2012. *Analysis: Coal Becoming Sunset Industry*. The Jakarta Post, 27 September 2012 edition.
- Drost, A. (1996) Research Notes. Developing sustainable tourism for World Heritage sites. *Annals of Tourism Research* 23(2): 479-492.
- Engelhardt, R.A. 2005. World Heritage: Its Implication and Relevance for Humanity.

- Presentation paper. Training Workshop on the Conservation and Management of World Heritage Sites, 18 April 2005, UNITAR Hiroshima Office for Asia and the Pacific: Hiroshima.
- Fahmy, N. 2012. *Cagar Budaya yang Terancam di Tepian Batanghari* (Threatened Cultural Heritage on the Batanghari River Banks). Kompas edisi 20 Maret 2012.
- Hapsari, M. 2011 Coping with Environmental Standards in Trade: Indonesian Experience with Sustainable Palm Oil Debate. *Journal of World Trade Studies* 2(1), pp.7-22. Yogyakarta: U Gadjah Mada.
- Kausar, D.R. 2011. Socio-economic Impacts of Heritage Tourism on Its Locality: A Case Study of Borobudur Temple Compounds World Heritage Site, Central Java. *Forum of International Development Studies* 40: 131-150.
- Leask, A. 2006. World Heritage Designation. In Leask, A. and Fyall, A. (eds) *Managing World Heritage Sites*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Li, M., Wu, B., dan Cai, L. 2008. Tourism Development of World Heritage Sites in China: A Geographic Perspective. *Tourism Management* 29(2): 308-319.
- Matsuura, K. 2008. Keynote speech. In World Heritage and Public Works: Development Cooperation for Poverty Alleviation Seminar. Tokyo, Japan 29 August 2008. United Nations University: Tokyo.
- Munoz, P.M. 2006. *Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula*. Singapore: Editions Didier Millet Pte Ltd.
- Nuryanti, W. 1996. Heritage and Postmodern Tourism. *Annals of Tourism Research* 23(2): 249-260.
- Putnam, R.D. 1995. Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy* 6(1): 65-78.
- Poria, Y., Reichel, A. dan Biran, A. 2006. Heritage Site Management: Motivations and Expectations. *Annals of Tourism Research* 33(1): 162-178.
- Rizzo, I. dan Mignosa, A. 2006. Policy Decisions and Cultural Heritage Impact. In McLoughlin, J., Kaminski, J. and Sodagar, B. (eds) *Heritage Impacts 2005*. Budapest: Archaeolingua.
- Sirait, J. 2012. *A Lost Island and Temple of Doom as Jambi Trade Away its Valuable History*. The Jakarta Globe, 8 March 2012 edition.
- Stebbins, R.A. 1996. Cultural Tourism as Serious Leisure. *Annals of Tourism Research* 23(4): 948-950.
- Sudhamek, AWS. 2011. *Muarajambi: Universitas Tertua di Indonesia* (Muarajambi: The Oldest University in Indonesia). Kompas, 7 September 2011 edition.
- Timothy, D.J. dan Nyaupane, G.P. 2009. *Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A Regional Perspective*. Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility Series. Routledge, Oxon.
- Tirtosudarmo, R. 2013. *The Political Economy of Cultural Heritage*. The Jakarta Post, 25 January 2013 edition.
- Throsby, D. 2003. Cultural Sustainability. In Ruth Towse (ed) *A Handbook of Cultural Economics*. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
- UNESCO. 2009. Muarajambi Temple Compound. Tersedia online: <http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5465/>, diakses 3 November 2013.
- Utomo, B.B. 2012. *Buddhism in Nusantara*. Surabaya: Buddhist Education Center.
- Wahid. 2011. *Hubungan Historis Candi Muaro Jambi – Nalanda* (Historical Relationships between Muaro Jambi and Nalanda). Tribun Jambi, 23 February 2011 edition.

